

Transformasi Digital dalam Sistem Perpajakan: Peluang dan Tantangan pada SMK Dharma Loka Pekanbaru

¹Kardi*, ²Marice Br. Hutahuruk, ³Anne Monika Fristy, ⁴Ayuthia Ramadhani Herman, ⁵Vika Miftahul Jannah, ⁶Yurnal Edwar

¹Akuntansi, Institut Teknologi dan Bisnis Master, Pekanbaru, Indonesia

^{2,3,4}Akuntansi, Institut Teknologi dan Bisnis Master, Pekanbaru, Indonesia

^{5,6}Akuntansi Syariah, Institut Agama Islam Edy Hariyono Madani, Indonesia

Email Corresponding: k412d1e.81@gmail.com*

INFORMASI ARTIKEL	ABSTRAK
Kata Kunci: Pajak Digital Transformasi Digital Kepatuhan Pajak Edukasi Pajak	Transformasi digital dalam sistem perpajakan telah membawa perubahan signifikan dalam proses administrasi pajak dan kepatuhan wajib pajak, khususnya di era ekonomi digital yang berkembang pesat. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan literasi perpajakan digital di kalangan pelajar menengah kejuruan melalui edukasi yang interaktif dan partisipatif. Kegiatan ini dilaksanakan di SMK Dharma Loka Pekanbaru dan melibatkan 48 siswa dari jurusan Akuntansi dan Bisnis Daring. Metode pelaksanaan mencakup penyampaian materi, diskusi kelompok, simulasi pelaporan pajak menggunakan sistem e-Filing dan e-Billing, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test. Data dianalisis secara deskriptif kuantitatif dan kualitatif untuk mengukur peningkatan pemahaman dan partisipasi siswa. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan pemahaman siswa terhadap konsep pajak digital sebesar 41%, dengan nilai rata-rata post-test mencapai 79,3. Selain itu, sebagian besar peserta menunjukkan antusiasme tinggi dan ketertarikan terhadap sistem perpajakan digital, termasuk minat untuk membuat akun DJP Online. Namun, tantangan seperti keterbatasan infrastruktur digital dan kesenjangan literasi teknologi masih menjadi hambatan yang perlu diatasi. Kegiatan ini menyimpulkan bahwa edukasi perpajakan digital di sekolah menengah kejuruan efektif dalam membangun kesadaran pajak dan kesiapan generasi muda menghadapi sistem perpajakan modern. Diperlukan kolaborasi antara dunia pendidikan, pemerintah, dan otoritas pajak untuk mengintegrasikan materi pajak digital dalam kurikulum sekolah guna menciptakan ekosistem perpajakan yang inklusif dan berkelanjutan.
Keywords: Digital Tax Digital Transformation Tax compliance Tax Edukasi	ABSTRACT The digital transformation of the taxation system has brought significant changes to tax administration processes and taxpayer compliance, particularly in the rapidly evolving digital economy. This community service activity aimed to improve digital tax literacy among vocational high school students through interactive and participatory education. The activity was conducted at SMK Dharma Loka Pekanbaru and involved 48 students from the Accounting and Digital Business departments. The method included material presentation, group discussions, simulations of tax reporting using e-Filing and e-Billing systems, and evaluation through pre- and post-tests. Data were analyzed using descriptive quantitative and qualitative methods to measure the improvement in student understanding and engagement. The results showed a 41% increase in students' understanding of digital tax concepts, with an average post-test score of 79.3. Additionally, most participants demonstrated high enthusiasm and interest in digital tax systems, including motivation to create a DJP Online account. However, challenges such as limited digital infrastructure and varying levels of technological literacy remain key obstacles that must be addressed. This program concludes that digital tax education at the vocational high school level is effective in fostering tax awareness and preparing the younger generation for modern tax systems. Collaboration among educational institutions, the government, and tax authorities is necessary to integrate digital tax topics into school curricula to create a more inclusive and sustainable tax ecosystem. This is an open access article under the CC-BY-SA license. 

I. PENDAHULUAN

Digitalisasi perpajakan tidak hanya merevolusi cara administrasi pajak dikelola, tetapi juga mengubah paradigma hubungan antara pemerintah dan wajib pajak. Dalam konteks Indonesia, implementasi sistem digital seperti e-Filing, e-Billing, dan e-Faktur telah mempercepat proses pelaporan dan pembayaran pajak serta menurunkan risiko fraud atau manipulasi data pajak (Darussalam & Septriadi, 2019). Digitalisasi juga mendukung terciptanya compliance risk management yang lebih terstruktur melalui pemanfaatan big data analytics (DDTC, 2022).

Namun demikian, berbagai studi menunjukkan bahwa keberhasilan sistem ini sangat bergantung pada tingkat literasi teknologi masyarakat. Banyak wajib pajak, khususnya di daerah, masih belum memahami penggunaan aplikasi digital perpajakan secara optimal (Gunadi, 2021; Mardiasmo, 2022). (Ardika, 2023) menunjukkan bahwa kesadaran pajak yang dibarengi edukasi digital berdampak positif terhadap kepatuhan formal wajib pajak. Menurut laporan Kominfo, hingga 2023, lebih dari 25% penduduk Indonesia masih tergolong dalam kategori literasi digital rendah, yang menjadi hambatan signifikan dalam implementasi sistem perpajakan modern. (Yosefin, 2022) membuktikan bahwa penggunaan sistem digital secara signifikan meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Selain itu, pelajar sebagai calon wajib pajak belum menjadi sasaran utama dalam strategi edukasi pajak. Padahal, menanamkan kesadaran pajak sejak dini sangat penting untuk membentuk generasi yang taat pajak dan melek digital. Edukasi perpajakan kontekstual kepada pelajar di sekolah menengah, terutama SMK yang berbasis keterampilan dan kewirausahaan, merupakan strategi yang efektif untuk menjembatani kesenjangan pemahaman dan kesiapan terhadap sistem perpajakan digital (Hayati & Furqon, 2025; Rosyid et al., 2024). Falah (2023) menekankan perlunya pelibatan generasi muda dan pelajar dalam kurikulum kesadaran pajak berbasis literasi digital.

Penting juga dicatat bahwa pemerintah Indonesia sedang berada dalam masa transisi menuju ekosistem pajak digital yang lebih inklusif, salah satunya melalui kebijakan perluasan objek pajak digital kepada pelaku usaha luar negeri tanpa kehadiran fisik (significant economic presence). Kebijakan ini tidak hanya untuk mengejar potensi penerimaan negara yang hilang, tetapi juga menciptakan kesetaraan antara pelaku usaha domestik dan global (Arimbhi et al., 2021; OECD, 2020).

Mengingat pentingnya peran generasi muda dalam era ekonomi digital, maka kegiatan pengabdian masyarakat di lingkungan pendidikan seperti SMK menjadi sangat relevan. Pendekatan literasi pajak berbasis digital akan membantu menciptakan generasi yang bukan hanya sadar pajak, tetapi juga kritis dan siap berpartisipasi dalam sistem fiskal digital yang berkeadilan. Dalam perkembangan terkini, negara-negara maju mulai menerapkan sistem berbasis Artificial Intelligence (AI) dan platform seperti CORTEX (Compliance Risk Management System) yang digunakan oleh negara-negara anggota OECD. Sistem ini membantu otoritas pajak dalam mendeteksi perilaku berisiko tinggi dari wajib pajak, menganalisis pola transaksi tidak biasa, serta melakukan segmentasi wajib pajak berbasis perilaku dan data historis (Evans & Kim, 2022; OECD, 2021).

Beberapa negara seperti Australia dan Inggris telah mengadopsi sistem serupa untuk mempercepat pengawasan digital dan memperkuat keadilan fiskal (KPMG, 2020). Dalam konteks Indonesia, walaupun sistem seperti CORTEX belum sepenuhnya diimplementasikan, pemanfaatan data analytics dan pemetaan risiko berbasis sistem DJP (Data Center Perpajakan Nasional) telah menjadi langkah awal menuju penerapan pengawasan pajak berbasis AI (Lubis & Suryani, 2020). Dengan integrasi ini, proses pemeriksaan pajak tidak lagi bersifat reaktif melainkan proaktif dan prediktif. Data transaksi dari e-commerce, perbankan digital, dan aplikasi keuangan lain dapat diolah secara real-time sehingga mempermudah pengambilan kebijakan fiskal yang akurat dan responsif (Fano & Stotzky, 2023).

Namun demikian, dari berbagai studi yang telah dilakukan, terdapat kesenjangan yang cukup mencolok dalam pendekatan edukasi perpajakan digital, khususnya pada kalangan pelajar sekolah menengah kejuruan. Sebagian besar penelitian dan pengabdian terdahulu lebih berfokus pada evaluasi kebijakan fiskal digital dari perspektif kelembagaan dan kepatuhan wajib pajak aktif, seperti pelaku usaha atau entitas korporasi (Hayati & Furqon, 2025; Lian & Seventeen, 2024; Rosyid et al., 2024). Pendekatan tersebut umumnya bersifat makro dan berbasis data sekunder, dengan sedikit keterlibatan langsung dalam bentuk edukasi praktik kepada calon wajib pajak, yaitu pelajar. Padahal, generasi muda inilah yang akan menjadi bagian dari sistem perpajakan di masa depan, baik sebagai wajib pajak individu maupun pelaku ekonomi digital. Tidak ditemukan banyak pengabdian masyarakat yang secara khusus mengintegrasikan pendekatan berbasis pengalaman langsung

(experiential learning) dalam bentuk simulasi sistem e-Filing, e-Billing, dan studi kasus nyata perpajakan digital di lingkungan sekolah.

Kegiatan pengabdian masyarakat ini hadir untuk mengisi kekosongan tersebut melalui pelaksanaan program edukasi interaktif kepada siswa SMK Dharma Loka Pekanbaru, yang tidak hanya menyampaikan pengetahuan teoretis tetapi juga memberikan pengalaman langsung dalam praktik perpajakan digital. Program ini menawarkan kontribusi baru dalam pengembangan literasi perpajakan generasi muda melalui pendekatan partisipatif, kontekstual, dan berbasis teknologi. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya menjadi media sosialisasi konsep perpajakan digital, tetapi juga menjadi model replikasi yang dapat diterapkan di berbagai sekolah menengah dalam rangka mendukung agenda nasional menuju sistem perpajakan yang lebih inklusif, transparan, dan berbasis teknologi.

II. MASALAH

Bagaimana tingkat pemahaman siswa SMK tentang sistem perpajakan digital? Apa saja peluang dan tantangan dari penerapan pajak digital di Indonesia yang relevan dipahami oleh pelajar? Bagaimana metode edukatif dapat meningkatkan literasi perpajakan digital di tingkat sekolah?



Gambar 1. Lokasi PkM

III. METODE

1. Desain Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat ini menggunakan pendekatan edukatif-partisipatif dengan desain deskriptif kualitatif dan kuantitatif sederhana. Tujuan utamanya adalah meningkatkan literasi perpajakan

digital di kalangan siswa sekolah menengah kejuruan melalui metode penyuluhan interaktif, simulasi praktik langsung, dan evaluasi berbasis data primer.

2. Lokasi dan Sasaran

Program dilaksanakan pada 22 Mei 2025 di SMK Dharma Loka Pekanbaru, dengan peserta berjumlah 48 siswa kelas X dan XI dari jurusan Akuntansi. Sasaran dipilih berdasarkan relevansi jurusan dengan tema perpajakan serta kesiapan pihak sekolah dalam mendukung literasi digital fiskal.

3. Tahapan Pelaksanaan

Kegiatan dilaksanakan dalam beberapa tahapan sebagai berikut:

a. Tahap Persiapan

Koordinasi dengan sekolah, guru akuntansi, dan kesiswaan. Survei awal untuk mengukur tingkat pemahaman awal siswa mengenai sistem perpajakan digital. Penyusunan materi edukatif, mencakup:

- 1) Sistem perpajakan nasional dan reformasi fiskal digital
- 2) Penjelasan e-Filing, e-Billing, e-Faktur
- 3) Kasus perpajakan digital (Netflix, Google, Shopee)
- 4) Dasar hukum seperti PMK No. 48/PMK.03/2020 dan UU HPP No. 7 Tahun 2021

Media pendukung: PowerPoint, video pendek edukatif (sumber: DJP dan YouTube Direktorat P2Humas), leaflet pajak digital, dan simulasi DJP Online.

b. Tahap Pelaksanaan

Kegiatan berlangsung selama satu hari dalam format workshop interaktif, dengan metode:

- 1) Presentasi materi visual interaktif oleh tim dosen
- 2) Diskusi kelompok terarah (FGD) berdasarkan studi kasus pajak digital dalam transaksi e-commerce
- 3) Simulasi e-Filing dan e-Billing menggunakan perangkat laptop dan koneksi internet sekolah
- 4) Kuis evaluatif digital menggunakan aplikasi Kahoot sebagai metode refleksi pembelajaran

c. Evaluasi dan Dokumentasi

- 1) Pre-test dan post-test diberikan untuk mengukur peningkatan pemahaman siswa, terdiri dari 10 soal pilihan ganda.
- 2) Observasi langsung keterlibatan peserta selama kegiatan.
- 3) Wawancara singkat dengan guru dan beberapa siswa sebagai umpan balik kualitatif.
- 4) Dokumentasi kegiatan dilakukan dalam bentuk foto, video

4. Teknik Analisis Data

- a. Data kuantitatif dari pre-test dan post-test dianalisis menggunakan metode deskriptif komparatif untuk melihat perbedaan skor rata-rata.
- b. Data kualitatif dari observasi, FGD, dan wawancara dianalisis dengan pendekatan analisis tematik untuk mengidentifikasi pola pemahaman, sikap, dan tantangan siswa dalam memahami perpajakan digital.

5. Bahan dan Alat Penunjang

Beberapa alat dan sumber data yang digunakan dalam kegiatan meliputi:

1. Laptop dan proyektor untuk presentasi materi
2. Simulasi DJP Online
3. Internet dan Wi-Fi sekolah
4. Formulir Google Form untuk pre-test dan post-test
5. Leaflet dan infografik pajak digital yang disusun oleh tim dosen
6. Aplikasi Kahoot dan Quizizz untuk kuis digital

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Kegiatan

Pengabdian masyarakat ini menunjukkan peningkatan pemahaman siswa terhadap konsep perpajakan digital sebesar 41%, yang tercermin dari selisih nilai rata-rata pre-test (56,2) dan post-test (79,3). Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian (Yosefin, 2022), yang menunjukkan bahwa penggunaan sistem perpajakan digital seperti e-Filing secara signifikan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun, berbeda dengan penelitian tersebut yang berbasis data responden dewasa dan pelaku usaha, kegiatan ini menyoroti pelajar SMK sebagai kelompok yang belum banyak disentuh oleh program literasi perpajakan formal. Selain itu, (Hayati & Furqon, 2025; Rosyid et al., 2024) dalam penelitiannya mengangkat pentingnya

kebijakan digitalisasi fiskal nasional dan hambatan implementasi pada level regulasi dan sistem. Namun, pendekatan mereka bersifat makro dan tidak menitikberatkan pada intervensi edukatif di tingkat sekolah. Sementara itu, pengabdian ini menggunakan metode edukasi partisipatif berbasis praktik langsung (*experiential learning*), yang terbukti tidak hanya meningkatkan pemahaman kognitif, tetapi juga membangkitkan minat siswa untuk terlibat aktif dalam sistem perpajakan (misalnya, melalui keinginan membuat akun DJP Online).

Lebih lanjut, belum ditemukan studi atau pengabdian sebelumnya yang secara eksplisit menyelenggarakan simulasi sistem perpajakan digital di lingkungan SMK dengan pendekatan menyeluruh, dari pemberian materi, diskusi kasus, hingga praktik e-Filing. Dengan demikian, kontribusi utama kegiatan ini terletak pada perluasan sasaran edukasi pajak digital, dari pelaku usaha ke calon wajib pajak masa depan, serta penguatan literasi fiskal melalui metode yang berbasis praktik, lokal, dan kontekstual.

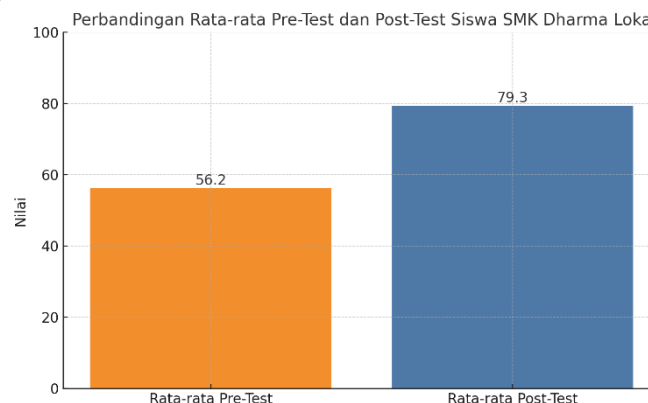
1. Peningkatan Pemahaman Konsep Pajak Digital

Berdasarkan hasil pre-test dan post-test yang diberikan kepada peserta sebelum dan sesudah kegiatan edukasi, terjadi peningkatan pemahaman siswa terhadap konsep pajak digital sebesar 41%, dengan rata-rata nilai pre-test sebesar 56,2 dan post-test sebesar 79,3. Hal ini menunjukkan bahwa siswa mengalami peningkatan signifikan dalam memahami:

- Fungsi dan peran pajak sebagai sumber penerimaan negara.
- Perbedaan antara perpajakan konvensional dan digital.
- Penggunaan sistem e-Filing, e-Billing, dan e-Faktur dalam administrasi perpajakan.
- Dasar hukum pemungutan pajak digital di Indonesia, seperti PMK No. 48/PMK.03/2020 dan UU HPP No. 7 Tahun 2021.

Hasil ini sejalan dengan temuan (Rosyid et al., 2024) bahwa edukasi berbasis teknologi dan pendekatan langsung mampu meningkatkan pemahaman serta kesadaran wajib pajak, khususnya dari kalangan generasi muda.

Berikut disajikan diagram perbandingan rata-rata nilai pre-test dan post-test siswa:



Gambar 1. Perbandingan Rata-rata Nilai Pre-Test dan Post-Test Siswa SMK Dharma Loka Pekanbaru

2. Partisipasi Aktif dan Respons Siswa

Selama sesi diskusi dan simulasi:

- Lebih dari 80% siswa terlibat aktif dalam diskusi kelompok dan menjawab kuis dengan antusias.
- Siswa mampu menjelaskan kasus perpajakan digital sederhana seperti pajak transaksi e-commerce atau pajak layanan streaming (Netflix, Spotify).

Bahkan beberapa siswa menyampaikan ketertarikan untuk membuat akun DJP Online setelah kegiatan. Hal ini menunjukkan adanya internalisasi nilai pajak digital ke dalam kesadaran fiskal pelajar. Temuan ini mendukung teori *Technology Acceptance Model (TAM)* yang menyatakan bahwa persepsi kemudahan dan kebermanfaatan teknologi mendorong penerimaan teknologi (Davis 1989 dalam Sihombing & Sibagariang, 2020).

3. Tantangan yang Dihadapi

Meski kegiatan berjalan lancar, terdapat beberapa tantangan yang muncul:

Keterbatasan Infrastruktur Sekolah

Laboratorium komputer SMK Dharma Loka Pekanbaru belum sepenuhnya terhubung dengan jaringan internet yang stabil, sehingga pelaksanaan simulasi e-Filing dan e-Billing tidak dapat dilakukan secara real-time saat kegiatan berlangsung. Hal ini menjadi kendala teknis utama dalam mendukung metode pembelajaran berbasis praktik digital. Untuk mengatasi hal ini, tim pengabdian melakukan pendekatan alternatif berupa penayangan video tutorial dan demo simulasi menggunakan akun yang sebelumnya sudah direkam secara offline. Keterbatasan ini tidak hanya menjadi isu lokal, tetapi juga mencerminkan kondisi umum tantangan digitalisasi perpajakan di Indonesia. Berdasarkan Survei Indeks Pembangunan Teknologi Informasi dan Komunikasi (IP-TIK) oleh BPS (2023), tercatat bahwa indeks akses dan infrastruktur TIK di provinsi Riau masih berada di bawah rata-rata nasional, yakni sebesar 4,81 dibandingkan angka nasional 5,22 pada skala 1–10. Selain itu, laporan Kominfo tahun 2023 menunjukkan bahwa 45% satuan pendidikan di luar Jawa belum memiliki akses internet yang memadai untuk kegiatan pembelajaran digital. Kondisi ini memperkuat temuan dalam kegiatan ini bahwa implementasi edukasi perpajakan digital sangat tergantung pada kesiapan infrastruktur pendukung. Dari observasi tim pengabdian, 80% siswa menyatakan kendala utama dalam mencoba simulasi e-Filing adalah keterbatasan sinyal dan perangkat, yang dikonfirmasi melalui kuesioner post-test tambahan. Sebagai respons, guru pendamping menyampaikan perlunya pembaharuan perangkat laboratorium dan pengajuan bantuan akses internet kepada Dinas Pendidikan Provinsi. Hal ini mengindikasikan bahwa keberhasilan literasi perpajakan digital tidak cukup hanya dengan konten edukatif, tetapi juga memerlukan dukungan sistemik berupa fasilitas dan konektivitas.

Dengan demikian, keterbatasan infrastruktur harus dianggap sebagai variabel penting dalam desain program edukasi perpajakan digital di sekolah. Diperlukan sinergi antara pemerintah daerah, sekolah, dan penyedia layanan internet untuk menjembatani kesenjangan ini, sebagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024 yang menargetkan pemerataan akses digital sebagai bagian dari transformasi pelayanan publik berbasis teknologi.

Literasi Digital yang Masih Variatif

Siswa dari jurusan non-akuntansi mengalami kesulitan dalam memahami istilah pajak dan teknologi secara bersamaan. Ini membuktikan pentingnya edukasi perpajakan lintas disiplin, bukan hanya untuk siswa akuntansi.

Kurangnya Materi Perpajakan di Kurikulum Sekolah

Guru akuntansi menyampaikan bahwa topik perpajakan digital belum dimasukkan dalam modul pembelajaran. Ini mendukung gagasan bahwa perlunya integrasi konten kesadaran pajak dalam kurikulum nasional.

Pembahasan Berdasarkan Literatur

Berdasarkan hasil kegiatan dan perbandingan dengan literatur:

Digitalisasi perpajakan melalui e-Filing, e-Billing, dan PMSE terbukti mempermudah pelaporan dan pembayaran pajak secara signifikan (Lian & Seventeen, 2024; Lubis & Suryani, 2020). Namun, tingkat adopsi teknologi dan literasi pajak digital di kalangan pelajar masih bervariasi dan membutuhkan pendekatan edukatif khusus. Kegiatan edukasi seperti ini sangat relevan karena mendukung upaya pemerintah dalam memperluas basis wajib pajak, terutama dari sektor digital dan generasi milenial (Arimbhi et al., 2021; Hayati & Furqon, 2025). Adanya kesenjangan teknologi, rendahnya literasi, dan tantangan adaptasi regulasi di level sekolah menunjukkan bahwa digitalisasi pajak memerlukan pendekatan holistik: teknologi, pendidikan, hukum, dan kesadaran publik harus berjalan bersama (Evans & Kim, 2022; OECD, 2021).

V. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian masyarakat dengan tema Transformasi Digital dalam Sistem Perpajakan yang dilaksanakan di SMK Dharma Loka Pekanbaru menunjukkan hasil yang positif dalam meningkatkan literasi perpajakan digital di kalangan pelajar sekolah menengah kejuruan. Berdasarkan hasil pre-test dan post-test, terdapat peningkatan pemahaman siswa sebesar 41%, dengan rata-rata nilai post-test mencapai 79,3. Hal ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif-partisipatif yang digunakan, termasuk penyampaian materi interaktif, simulasi sistem e-Filing, dan diskusi kasus perpajakan digital, efektif dalam mendorong pemahaman konseptual dan keterlibatan aktif siswa. Selain itu, lebih dari 80% peserta menunjukkan antusiasme tinggi dalam diskusi dan kuis, serta sebagian besar menyatakan minat untuk membuat akun DJP Online. Temuan ini menunjukkan adanya perubahan sikap kearah yang lebih positif terhadap sistem perpajakan modern, yang menjadi indikator penting dari keberhasilan internalisasi nilai-nilai kepatuhan pajak pada generasi muda.

Namun, kegiatan ini juga mengungkap tantangan serius terkait keterbatasan infrastruktur digital di sekolah. Ketidakstabilan jaringan internet menjadi kendala utama dalam pelaksanaan simulasi daring. Berdasarkan data observasi dan kuesioner tambahan, sekitar 80% siswa mengalami kesulitan teknis, yang memperkuat pentingnya dukungan sistem infrastruktur sebagai prasyarat utama keberhasilan edukasi perpajakan digital. Dengan demikian, kegiatan ini menyimpulkan beberapa poin penting sebagai kontribusi:

1. Edukasi perpajakan digital berbasis praktik langsung efektif diterapkan di SMK, terbukti melalui peningkatan skor dan perubahan sikap siswa terhadap pentingnya pajak.
2. Generasi muda, khususnya siswa SMK, merupakan target strategis dalam perluasan basis wajib pajak masa depan, dan harus menjadi sasaran utama program literasi fiskal nasional.
3. Infrastruktur digital sekolah menjadi determinan keberhasilan program literasi pajak digital; oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi antara sekolah, pemerintah daerah, dan penyedia teknologi untuk menjamin akses setara.
4. Model pengabdian ini dapat direplikasi di sekolah lain dengan pendekatan yang kontekstual dan adaptif, sebagai kontribusi nyata dalam mendukung agenda transformasi digital sistem perpajakan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih disampaikan kepada SMK Dharma Loka Pekanbaru atas partisipasi dan kerjasamanya, serta kepada Institut Teknologi dan Bisnis Master dan Institut Ehmi atas dukungan dan keterlibatan dalam kegiatan pengabdian ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardika, M. I. (2023). *Kesadaran Pajak dan Digitalisasi*.
- Arimbhi, P., Rahmi, N., Wulandari, W., Ramdan, A., & Rachmatulloh, I. (2021). Peluang dan tantangan pajak digital di Indonesia. *Jurnal Transparansi*, 4(2), 148–154.
- Darussalam, D., & Septriadi, D. (2019). *Perpajakan Internasional: Konsep dan Aplikasi*. DDTC Publishing.
- DDTC. (2022). *Tax Literacy Index Indonesia*. DDTC Fiscal Research.
- Evans, C., & Kim, C. J. (2022). *Taxation in the Digital Economy*. Routledge.
- Fano, A., & Stotzky, R. (2023). *Digital Services Taxes and AI in Global Tax Administration*.
- Gunadi. (2021). *Sistem dan Kebijakan Perpajakan*. UI Press.
- Hayati, F., & Furqon, I. K. (2025). Tantangan dan peluang penerapan pajak digital di Indonesia dalam era ekonomi digital. *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis*, 17(1), 130–134. <https://doi.org/10.55049/jeb.v17i1.406>
- KPMG. (2020). *The Role of Artificial Intelligence in Modern Tax Administration: Global Insights Report*. KPMG International.
- Lian, S., & Seventeen, W. L. (2024). Transformasi kebijakan perpajakan dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak di era digital. *Jurnal Perubahan Ekonomi*, 8(12), 390–393.
- Lubis, I., & Suryani. (2020). *Perpajakan Digital*. Andi.
- Mardiasmo. (2022). *Perpajakan Edisi Terbaru*. Andi.
- OECD. (2020). *Tax Challenges Arising from Digitalisation – Report on Pillar One and Pillar Two*. OECD Publishing.
- OECD. (2021). *Tax Administration 2021: Comparative Information on OECD and Other Advanced and Emerging Economies*. OECD Publishing.
- Rosyid, M. A., Pangesti, I., Hasanah, N., & Mastutik, S. (2024). Pengaruh digitalisasi terhadap kepatuhan dan penerapan hukum pajak di Indonesia. *Jurnal Mendapo*, 5(3), 265–280. <https://doi.org/10.22437/mendapo.v5i3.32242>
- Sihombing, S., & Sibagariang, S. A. (2020). *Perpajakan: Teori dan Aplikasi*. Widina Bhakti Persada.
- Yosefin, M. A. (2022). Pengaruh digitalisasi pajak terhadap kepatuhan. *Jurnal MUDIMA*, 4(1), 112–121.